

UJIAN TENGAH SEMESTER

KEBIJAKAN PUBLIK DAN APLIKASINYA



**NAMA
NPM**

**: NABILAH PUTRI SAKINAH
: 2526061017**

**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

Analisis Agenda Setting Kebijakan Publik tentang Penanggulangan Bullying di Indonesia

BAB I

A. Latar belakang

Di era digital ini, tidak dapat dipungkiri bahwa arus informasi tidak mudah untuk terkendali. Dengan berbagai banyak media yang bermunculan, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih media mana yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Akan tetapi, sebelum setiap individu memilih untuk menggunakannya. Media juga tentunya memiliki peran penting dalam menyajikan suatu berita. Proses yang dilakukan media dalam memilih berita apa saja yang akan dipublikasikan merupakan proses yang menarik untuk diteliti dan ditelaah. Mengingat, setiap media memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda. Pada masa yang kian semakin maju dan berkembang, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah, hingga koran) atau elektronik (radio, televisi, hingga handphone) yang saat ini dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat dan berbeda tempat. Media massa yang memudahkan mengakses informasi dan menjadi isu ke ranah politik dan dibicarakan oleh banyak masyarakat dapat menjadi acuan pemerintah dalam menindaklanjuti ke pemerintahan.

Kebutuhan informasi bagi masyarakat Indonesia tidak lagi sekedar kebutuhan sesaat akan tetapi sudah menjadi kebutuhan yang esensial. Informasi-informasi aktual atau ragam peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di suatu daerah dapat disajikan dan disebarluaskan oleh media massa secara berkala dalam waktu singkat dan menjangkau khalayak di tempat yang jauh dan luas. Informasi atau peristiwa yang disebarluaskan ini bisa saja menjadi topik bahasan di ranah publik (public sphere). Dengan demikian, media massa memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik.

Dari beberapa asumsi mengenai efek komunikasi massa, satu yang bertahan dan berkembang ini menganggap bahwa media massa dengan memberikan perhatian pada isu tertentu dan mengabaikan yang lainnya, akan memiliki pengaruh terhadap pendapat umum. Masyarakat akan cenderung lebih mengetahui secara luas tentang hal-hal yang diberitakan dan menerima susunan prioritas yang diberikan media massa terhadap isu-isu yang berbeda. Asumsi-asumsi yang dihasilkan ini berhasil lolos dari keraguan yang ditujukan kepada penelitian komunikasi massa yang menganggap media massa memiliki efek yang sangat kuat, terutama pada asumsi yang berkaitan dengan proses belajar dan bukan dengan perubahan sikap atau pendapat.

BAB II

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Menurut Prof. Dr. A. Hoogerwerf, dalam "Over Heids Beleid" (diterjemahkan "Ilmu Pemerintahan"), policy itu merupakan usaha mencapai tujuan tertentu dan dalam urutan waktu serta sarana tertentu. Policy adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, oleh karena itu ia adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah tertentu dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Menurutnya, untuk mengetahui Isi kebijakan itu sebaiknya menentukan terlebih dahulu hubungan antara masalah dengan kebijakan, dan sebaliknya. Masalah dapat dirumuskan sebagai ketidaksesuaian antara suatu ukuran (asas, norma, tujuan) dengan gambaran suatu keadaan sedang berlangsung atau diperkirakan akan terjadi; dengan demikian maka masalah adalah perbandingan ukuran yang dipakai dengan gambaran keadaan yang sedang berlangsung. Oleh karena ukuran dan gambaran keadaan yang sedang berlangsung itu dapat berbeda dan tergantung dari orang yang memandangnya, maka masalah kemasyarakatan atau masalah publik itu perlu dirumuskan tidak saja oleh yang menjalankan kebijakan, tetapi juga oleh obyek-obyek kebijakan, yaitu oleh orang-orang terhadap siapa kebijakan itu dijalankan. Kebijakan bukan hanya mengenai pertanyaan kemungkinan masalah, tetapi juga mengenai pertanyaan masalah mana yang akan ditangani terlebih dahulu, atau tentang bagaimana menyusun suatu urutan masalah; ada masalah yang harus diprioritaskan, sehingga urutan tersebut merupakan suatu daftar prioritas masalah yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan (environment). Menyusun suatu prioritas atau pembentukan agenda (agenda building) adalah proses yang menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang menjadi pokok perselisihan yang bersaing meminta perhatian dari yang menjalankan kebijakan-kebijakan dan/atau perhatian umum.

Sehubungan dengan uraian di atas, Solichin Abdul Wahab (1991), menengahkan ciri-ciri tentang kebijakan pemerintah/negara, yakni yang dilandasi pendapat David Easton, bahwa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan pemerintah/publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, misalnya para ketua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para raja, dsb. Orang-orang/ kelompok itulah yang bertanggungjawab atas urusan-urusan politik tersebut dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu, sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka. Oleh karena itu ciri-ciri kebijakan pemerintah/ publik, adalah:

Pertama, kebijakan publik/pemerintah lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.

Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan Keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya: Kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.

Ketiga, kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkret. Dengan kata lain, walau bagaimanapun kebijakan pemerintah itu dianggap bagus, jika tidak disertai dengan tindakan-tindakan yang konkret, maka pemerintah/publik itu sesungguhnya tidak mengatur apa yang seharusnya ditangani terutama yang menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Keempat, kebijakan pemerintah/publik mungkin berbentuk positif, maupun negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu; sementara dalam bentuknya yang negatif, kebijakan kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Pada awal uraian mengenai peristilahan, telah dikemukakan bahwa kebijakan pemerintah itu terjemahan dari "public policy"; dalam hubungan ini sering pula public policy tersebut diterjemahkan sebagai kebijakan publik. Mengenai istilah "public" sendiri adalah berasal dari bahasa Latin "Publicus" atau "pubes" = orang dewasa; atau dari poplicus dari populus atau people dalam bahasa Inggris = penduduk. Selanjutnya "public" itu sendiri dapat diartikan sebagai:

- Of or relating to the people; belonging to or affecting a nation, state, or community (Kepunyaan atau berkaitan dengan penduduk; kepunyaan atau mengenai suatu bangsa, negara atau masyarakat). Public dilawankan dengan private (partikelir, swasta, pribadi, perorangan).
- Open to general use, etc. (terbuka untuk penggunaan umum, terbuka, umum, dsb.).
- Generally seen, known or heard; not secret (Dilihat, diketahui atau didengar secara umum; tidak atau bukan rahasia).

2. Agenda Setting

Secara bahasa, pengertian agenda setting adalah "pengaturan agenda". Agenda sendiri, secara bahasa, artinya buku catatan atau acara. Secara istilah, agenda bermakna "tujuan", sebagaimana dalam istilah "agenda tersembunyi" (hidden agenda) alias maksud tertentu yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Agenda Setting disebut juga agenda media setting atau agenda media. Setiap media massa memiliki agendanya sendiri, sesuai dengan visi dan misi top manajemen, perusahaan, organisasi, dan khususnya pemilik media.

Jika diurai secara bahasa (etimologi) agenda setting diambil dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yakni agenda dan setting. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata agenda diartikan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: 1) buku catatan yang bertanggal untuk satu tahun: acara rapat itu telah dicatat dalam agenda; 2) acara (yang akan dibicarakan dalam rapat), hal itu tercantum juga dalam agenda rapat.(Ritonga, 2018)

Dari beberapa paparan diatas dapat disimpulkan bahwa agenda setting proses yang menjadi tahapan isu-isu atau berita tentang kebijakan yang perlu dijadikan prioritas tindakan pemerintah melalui pengaruh masyarakat dalam agenda rapat, media, maupun politik.

Agenda setting dibentuk berdasarkan isu yang sedang beredar di masyarakat, isu ini menyangkut tentang berbagai topik namun termasuk berita/informasi hoaks berdasarkan temuan dari Kementerian Kominfo. Isu-isu yang dianggap menonjol ini kemudian disajikan dalam bentuk berita/informasi di media sosial. Karakteristik media sosial adalah bebas tanpa adanya gatekeeper, sehingga berita/informasi hoaks yang tersaring dan kemudian di-posting di media sosial terjadi sesuai dengan keinginan dari pengguna atau penyebar hoaks. Hal ini kemudian menghasilkan agenda media sosial yang dapat memengaruhi pendapat publik tentang isu hoaks yang sedang ditonjolkan. Ada korelasi yang kuat dan signifikan antara apa yang diagendakan oleh media massa dan apa yang menjadi agenda publik. Penyusunan agenda setting menjelaskan tiga proses yaitu pertama, berita diseleksi, diolah, dan disajikan yang dikenal dengan proses gatekeeping. Kedua, menghasilkan agenda media. Ketiga, agenda media memengaruhi pendapat publik tentang isu yang ditonjolkan.(Juditha, 2019)

Teori agenda setting menyebutkan media memberi pengaruh kuat terhadap masyarakat dalam isu tertentu. Jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, atau salah satu angle peristiwa, maka media itu akan memengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Teori ini mengacu pada bagaimana liputan berita media menentukan isu mana yang menjadi fokus perhatian publik. Dengan demikian, teori agenda setting lahir, dibangun di atas gagasan bahwa media massa menetapkan agenda tentang apa yang harus diperhatikan orang. Fungsi agenda setting media massa ialah kemampuan media massa untuk menseleksi dan menekankan beberapa topik, menyebabkan publik menerima topik tersebut sebagai topik yang penting.(Erwan Efendi, Abdilah Taufiqurrohman, Tris Supriadi, 2023)

Stephen W. Littlejohn mengatakan, agenda setting beroperasi dalam tiga bagian sebagai berikut:

1. Agenda media itu sendiri harus diformat. Proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama kali.
2. Agenda media dalam banyak hal memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Pernyataan ini

memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media mampu memengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya.

3. Agenda publik memengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu

Pada prosesnya, agenda setting dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Public agenda setting: Agenda Publik merupakan yang mencoba memahami bagaimana opini publik dipengaruhi oleh konten media massa.
2. Media agenda setting: Agenda Setting media sendiri merupakan studi yang menekankan pada konten media yang berhubungan dengan definisi isu, seleksi dan penekanan yang dilakukan media.
3. Policy agenda setting: Agenda Kebijakan atau Policy Agenda berkaitan dengan relasi antara opini publik pada kebijakan elite, keputusan dan aksi.

Agenda setting merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh Maxwell McComb dan Donald L. Shaw. Agenda setting adalah sebagai pencipta suatu program atau agenda dan apabila media memasok tekanan terhadap sesuatu peristiwa, media akan mendorong publik atau publik menganggapnya penting. Agenda setting juga disebut sebagai pengaruh media massa atas khalayak publik serta budaya. Pada teori Maxwell McComb dan Donald L. Shaw tahapan agenda setting yaitu :

1. Agenda media

Media memilih isu tertentu yang dikiranya cukup untuk diprioritaskan, lebih sering menonjol, dan dapat segera ditanggulangi.

2. Agenda publik

Akibat penekanan isu oleh media, sehingga masyarakat mulai menganggap isu tersebut penting.

3. Agenda kebijakan

Ketika isu yang dianggap oleh publik mendapat perhatian besar, pembuat kebijakan (pemerintah) terdorong untuk menanggapinya.

Sedangkan John W. Kingdon berpendapat bahwa agenda-setting merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan kebijakan yang dimana didalamnya terdapat daftar isu-isu atau masalah yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah atau orang-orang yang mempunyai wewenang dalam pembuatan keputusan. Tahapan agenda-setting policy ini dapat dikatakan sebagai tahapan yang sangat berpengaruh dan penting dalam proses terbentuknya suatu kebijakan, hal tersebut dikarenakan didalam tahapan ini pemerintah atau orang yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan melakukan proses awal, yang dimana suatu isu-isu atau permasalahan publik dapat masuk ke dalam tahap

agenda kebijakan pemerintah guna nantinya dapat ditemukan dan dipecahkan solusinya melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau orang-orang yang berwenang mengeluarkan suatu kebijakan. Salah satu ahli yakni Barbara Nelson menggambarkan bahwasanya agenda-setting policy dapat terjadi apabila pejabat publik memberi perhatian kepada isu atau masalah baru, mempelajari isu tersebut dan pada akhirnya tergerak untuk melakukan sebuah tindakan tertentu yang melibatkan baik personal ataupun kelompok kepentingan yang mereka miliki.

Pendapat lain terkait konsep agenda-setting policy disampaikan oleh Robert W Cobb dan Charles D Edler, menurutnya dalam merumuskan kebijakan publik ditahap agenda-setting policy terbagi menjadi 2 diantaranya ialah agenda-setting lembaga ataupun pemerintah dan agenda-setting yang bersifat sistematis. Agenda-setting lembaga atau pemerintah merupakan suatu agenda yang didalamnya berisi terkait isu yang mendapatkan perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Sedangkan agenda-setting sistematis ialah suatu agenda pembahasan yang didalamnya berisi agenda dari seluruh isu yang menuntut perspektif dari para aktor politik yang dapat dianggap layak untuk mendapatkan perhatian secara serius oleh khalayak publik dan kemudian permasalahan atau isu tersebut diarahkan kepada pemerintah selaku badan yang memiliki wewenang yang sah dalam pembuatan kebijakan.

Teori agenda-setting policy yang dikembangkan oleh John W Kingdon terdapat 3 proses didalamnya, tahapan didalam agenda-setting policy tersebut diantaranya ialah proses identifikasi masalah (problem stream), penentuan kebijakan (policy stream) dan terakhir proses politik (political stream). Melalui ketiga proses ini isu-isu akan menghasilkan adanya kebijakan publik. (Alfathon et al., 2023)

1. Identifikasi Masalah (Problem Stream)

Dalam proses pembentukan kebijakan publik biasanya pembuat kebijakan publik tidaklah berhadapan langsung dengan suatu permasalahan yang diberikan, namun para aktor pembuat kebijakan inilah yang harus menemukan dan mencari masalah yang terdapat di tatanan masyarakat agar dibuatkan solusinya. Pembuat kebijakan harus mampu menemukan, mencari dan mengidentifikasi masalah yang terjadi dengan benar dan tepat. John W Kingdon mengemukakan bahwa isu ataupun permasalahan diperhatikan oleh pemerintah, hal tersebut dapat dijadikan alat oleh pemerintah untuk mengkaji serta memahami suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu masalah.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh John W Kingdon terkait alat yang digunakan untuk mempelajari suatu masalah ialah, yang pertama yakni indikator yang digunakan untuk mengukur sebuah masalah dapat dinilai penting atau tidak. Kedua yakni peristiwa, peristiwa yang dimaksud ialah kondisi yang terjadi agar pembuat kebijakan memberikan fokus dan perhatian akan peristiwa tersebut.

Ketiga ialah reaksi dalam bentuk informasi kinerja. Lalu yang terakhir ialah cara pembuat kebijakan menilai suatu peristiwa menjadi suatu masalah.

2. Penentuan Alternatif Kebijakan (Policy stream)

Tahapan selanjutnya dalam teori John W Kingdon setelah masalah publik tersebut didefinisikan oleh para aktor pembuat kebijakan dan melalui tahap penyeleksian oleh pemerintah yang kemudian menjadi sebuah agenda terkait masalah baru yang harus diselesaikan. Maka tahapan selanjutnya ialah para aktor pembuat kebijakan ini membuat solusi dalam memecahkan sebuah masalah yang terjadi di tatanan masyarakat. Para aktor pembuat kebijakan yang terlibat dalam hal ini diantaranya ialah unsur-unsur di dalam pemerintahan dan juga kelompok di luar pemerintahan. Aktor dari unsur-unsur pemerintahan yang dapat menyumbangkan alternatif pemecahan masalah diantaranya ialah aktor eksekutif dan legislatif. Sedangkan aktor lainnya ialah aktor non pemerintahan dan aktor diluar pemerintahan yang terlibat dalam memberikan solusi sebagai pemecahan masalah yang merupakan perseorangan secara lembaga umum, individu dan berbagai badan semi pemerintahan, lalu juga terdapat aktor lain seperti kelompok peneliti universitas, lembaga penelitian swasta, kelompok konsultan dan organisasi penelitian swasta yang berkontribusi untuk meyumbang solusi terkait permasalahan yang dihadapi.

Para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan nantinya akan memberikan alternatif solusi dan saling mengetahui antara satu dengan lainnya yang dituangkan ke dalam sebuah ide yang nantinya akan diperdebatkan serta diadopsi dan diperbaiki agar dapat dipertimbangkan secara baik. Serupa dengan hal ini John W Kingdon memberikan gambaran terkait aliran kebijakan dan mengartikannya sebagai “sub-purba”, maksudnya disini ialah gagasan atau ide yang menjadi solusi alternatif saling bersaing melalui proses seleksi berdasarkan kriteria yang mencakup kongruensi dengan nilai nilai yang terdapat pada masyarakat, kelayakan teknis danantisipasi masalah masa depan yang didalamnya juga berisi tentang penerimaan oleh publik, masalah anggaran dan penerimaan politis. Melalui proses seleksi inilah akan terbentuk suatu kolaborasi dari ide-ide yang saling bersaing dan pada akhirnya dapat saling melengkapi satu sama lainnya ditahapan seleksi ini dilanjutkan dengan tahap pertahanan, penghancuran dan tahap rekomendasi.

Metodologi analisis kebijakan diambil dan memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin: ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat. Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional (misalnya, ilmu politik) yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-kebijakan publik. Namun analisis kebijakn juga bersifat normatif; tujuan lainnya adalah menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Aspek normatif, atau kritik nilai, dari analisis kebijakan ini terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan

kebijakan mencakup dinamika antara variabel tergantung (tujuan) dan variabel bebas (cara) yang sifatnya valuative.(SATISPI et al., 2020)

3. Proses Politik (Political Stream)

Meskipun isu-isu yang terdapat pada masyarakat tadi telah memenuhi kriteria pada aliran masalah dan aliran kebijakan, akan tetapi belum tentu pada pelaksanaannya secara otomatis masalah diatas dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Proses politik sangat mempengaruhi masuk atau tidaknya isu untuk menjadi agenda kebijakan. Dalam proses politik terdapat aktor yang bertindak dan berperilaku secara politis yang diorganisasikan oleh berbagai kelompok kepentingan dan mencoba berusaha untuk mempengaruhi pembuat kebijakan untuk melaksanakan dan menyusun kebijakan yang bias dalam mengesampingkan kepentingan kelompok lainnya dan juga mengangkat kepentingan kelompoknya.

Kepentingan politik dalam proses kebijakan publik dapat diartikan sebagai sesuatu yang berasal dari nilai seseorang ataupun kelompok yang dapat diperoleh atau bisa hilang dari apa yang dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Biasanya kelompok kepentingan menekan para pembuat kebijakan untuk menerima alternatif solusi terhadap suatu permasalahan. Dalam aliran politik ini, biasanya aktor kelompok kepentingan menggunakan berbagai cara dalam proses negosiasi atau tawar-menawar agar mendapatkan dukungan dengan menambahkan para pejabat yang terpilih agar bisa berkoalisi dengan feedback yang diminta. Peran dari para kelompok kepentingan ini biasanya sering memperhambat akses usulan yang berlawanan dengan mereka, dalam hal ini biasanya mereka beradaptasi dengan usulan saran yang lebih memungkinkan menjadi sebuah agenda kebijakan pemerintahan dengan memasukkan beberapa unsur kelompok mereka didalamnya.

Aktor politik dalam aliran ini merupakan faktor penting didalam proses agenda setting policy yang mempunyai peran utama dalam aspek politis di tatanan pemerintahan. John W Kingdon mengklasifikasikan aktor yang terlibat dalam proses agenda-setting policy ke dalam 2 kategori yakni aktor yang terlihat dan aktor yang tidak terlihat. Aktor yang terlihat ialah aktor yang mendapatkan perhatian dari setiap elemen masyarakat, aktor tersebut diantaranya seperti presiden, partai politik dan anggota kongres yang menonjol. Sedangkan aktor yang tidak terlihat ialah aktor yang tidak mendapatkan perhatian dari publik, biasanya aktor tersebut terdiri dari staff kongres, akademisi, birokrat karir dan kelompok analisis kepentingan. Masing-masing dari kategori diatas mempunyai peranannya sendiri, aktor yang terlihat berperan dalam mempengaruhi agenda kebijakan sedangkan aktor yang tidak terlihat berperan dalam mempengaruhi solusi alternatif kebijakan.

Tanpa adanya jendela kebijakan (policy windows), ketiga aliran tersebut tidak akan menjadi sebuah agenda kebijakan. Jendela kebijakan berperan dalam mendorong berbagai solusi yang sudah ditetapkan berdasarkan ketiga aliran di

atas yang pada akhirnya akan membentuk hadirnya sebuah agenda kebijakan. Dalam artian, jendela kebijakan (policy windows) didefinisikan sebagai sebuah peluang agar mampu mendorong dan mendesak solusi- solusi alternatif dari para aktor-aktor pembuat kebijakan. Terbukanya jendela kebijakan (policy windows) berhubungan erat dengan terciptanya aliran politik, hal tersebut dikarenakan hubungan yang erat antara jendela kebijakan (policy windows) mampu mendorong suatu masalah atau isu yang masuk ke dalam sebuah agenda kebijakan. Aliran politik dalam jendela kebijakan mampu mendorong solusi atas permasalahan yang terjadi dan mengkaitkannya dengan masalah agar dapat dijadikan sebagai sebuah agenda kebijakan, dalam proses ini tentunya melibatkan para aktor politik yang bermain didalamnya.

pada teori teori yang telah dipaparkan di atas memiliki pandangan yang berbeda-beda dan makna yang berbeda. Berikut tabel perbedaan teori di atas

Tabel 1. Perbedaan Aspek di Setiap teori Agenda Setting

Aspek	Stephen W Littlejohn	John W. Kingdon	Maxwell McComb dan Donald L. Show
Bidang keilmuan	Komunikasi massa	Kebijakan publik	Komunikasi massa
Fokus utama	Peran media dalam membentuk persepsi publik	Proses politik dan birokrasi dalam menentukan agenda publik	Bagaimana media membentuk opini publik tentang isu
Aktor utama	Media dan Masyarakat	Pemerintah, birokrat, dan aktor politik	Media dan Masyarakat
Sifat agenda	Persepsi publik terhadap isu	Kebijakan resmi pemerintah	Persepsi publik terhadap isu
Proses utama	Penonjolan isu oleh media	Pertemuan tiga aliran dalam “policy window”	Prioritas isu dari media
Jenis pengaruh	Pengaruh informasi	Pengaruh politik dan kebijakan	Efek media dalam membentuk prioritas isu public
Hasil akhir	Isu menjadi penting dimata publik	Isu masuk ke agenda resmi pemerintah	Pembentukan agenda publik

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan teori John W. Kingdon dapat dikatakan teori yang tepat dalam proses tahapan agenda setting, karena teori ini fokus pada kebijakan publik sehingga menghasilkan kebijakan yang resmi yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga dalam menangani isu-isu yang beredar dengan tepat diambil kebijakannya oleh aktor kebijakan, birokrat, dan pemerintah.

Contohnya pada kasus Kesehatan mental dan dukungan psikologis masyarakat. Pada isu kasus depresi, bunuh diri, dan gangguan mental meningkat, akan tetapi belum ada kebijakan nasional tentang layanan kesehatan mental terintegrasi. Berikut tahapan proses agenda setting isu kesehatan mental di Indonesia secara ringkas yaitu

Tabel 2. Tahapan Proses Agenda Setting Kesehatan Mental di Indonesia

Tahap	Penjelasan	Contoh Nyata di Indonesia
Identifikasi Masalah	Meningkatnya kasus depresi, bunuh diri, dan gangguan mental di	1. Mahasiswa Buddhi Dharma Tangerang ditemukan tewas gantung diri di kampus dengan faktor utama karena depresi berkepanjangan. 2. Mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya ditemukan bunuh diri dengan melompat dari lantai 12, faktor utama yaitu kondisi mental yang rendah. 3. Mahasiswa Universitas Udayana pada 15 Oktober 2025 kemarin, mahasiswa tersebut bunuh diri dengan melompat dari gedung, faktor utama mahasiswa Unud melakukan bunuh diri karena adanya <i>bullying</i> yang dilakukan oleh temannya.
Formulasi Isu	Diskusi politik dan akademik tentang pentingnya pelayanan kesehatan mental nasional	Kampanye nasional, riset, dan webinar
Muncul Alternatif Kebijakan	Usulan pusat layanan psikologis, integrasi di puskesmas, hotline nasional	Program “Sehat Jiwa” dan “Halo KESWA”
Dukungan Politik dan Politik	DPR, Kemenkes, dan media mulai menyoroti isu	Pernyataan resmi Kemenkes 2023 tentang

		rencana aksi Kesehatan jiwa nasional
Masuk Agenda Kebijakan	Isu mulai dibahas ke dalam RPJMN dan APBD	Masih tahap pembahasan, belum jadi UU atau PP

Isu kesehatan mental dan dukungan psikologis Masyarakat sudah berada pada tahap akhir agenda setting yaitu mulai masuk dalam perhatian pemerintah dan publik, akan tetapi kasus ini belum diformalkan menjadi kebijakan nasional. Peluang akan terbuka lebar jika pemerintah mengalokasikan anggaran dan struktur kelembagaan khusus, adanya dukungan DPR, dan adanya Masyarakat yang mendesak kasus Kesehatan mental ini dan mengawal isu ini melalui kampanye publik dan media.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah dkk. 2016. Teosi dan Analisis Kbijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Alfathon, R. P., Fauzi Said, M., & Ilman Hakim, A. (2023). Analisis Agenda-setting Policy dalam Proses Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. *Journal of Politics and Policy*, 5(1), 40–57. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.01.04>
- Aurima, J., Susaldi, S., Agustina, N., Masturoh, A., Rahmawati, R., & Tresiana Monika Madhe, M. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia. *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences*, 1(2), 43–48. <https://doi.org/10.53801/oajjhs.v1i3.23>
- Bimrew Sendekie Belay. (2022). Deteksi Dini Stunting. *Deteksi Dini Tentang Ciri-Ciri Stunting Pada Baita Di Huta Holbung Kec.Angkola Muaratais Kab.Tapanuli Selatan*, 4(8.5.2017), 2003–2005.
- Erwan Efendi, Abdilah Taufiqurrohman, Tris Supriadi, E. K. (2023). Teori Agenda Setting Komunikasi. *Junral Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1715–1718.
- Fauziah, J., Trisnawati, K. D., Rini, K. P. S., & Putri, S. U. (2024). *Stunting : Penyebab , Gejala , dan Pencegahan*. 2, 1–11.
- Halimatussa'diah, Hasmawati, F., & Manalullaili. (2025). Analisis Agenda Setting di Harian Umum Palembang Pos Dalam Menarik Minat Pembaca Berita. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.47134/jpbsi.v1i2.1476>
- Juditha, C. (2019). Agenda Setting Penyebaran Hoaks di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 22(2), 155–168. <https://doi.org/10.20422/jpk.v22i2.669>
- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting Pada Anak : Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia. Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting Pada Anak : Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 14(1), 19–28. <https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.2372>
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1460>
- SATISPI, E., GANDINI, D., & RAHMAN, A. (2020). Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Praktek Kebijakan. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Yuana, N., Larasati, T., & Berawi, K. N. (2021). Analisis Multilevel Faktor Resiko Stunting di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(2), 213–217. <https://doi.org/10.30604/jika.v6i2.510>

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG UPAYA PEMERINTAH DI INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS STUNTING

BAB I

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang padat. Dalam hal tersebut Indonesia dalam menghadapi permasalahan yang kompleks dan saling berkaitan antara aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi salah satu isu utama di Indonesia, terlihat dari perbedaan Tingkat kesejahteraan antar daerah. Selain itu, birokrasi di Indonesia yang saat ini belum efisien, praktik korupsi, serta lemahnya penegakan hukum dapat menghambat terjadinya efektivitas kebijakan publik di Indonesia. Terkait masalah yang harus ditekankan oleh pemerintah terkait masalah kesehatan pada anak yaitu masalah stunting.

Masalah *stunting* di Indonesia masih tergolong tinggi di setiap daerah. Stunting merupakan masalah serius yang dialami anak-anak Indonesia karena gizi buruk yang berkepanjangan. Angka stunting tinggi menandakan banyak anak kekurangan gizi kronis yang mempengaruhi suatu pertumbuhan serta perkembangan anak-anak sehingga memerlukan tindakan yang cepat dan ditangani dengan serius. Masalah stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi. Anak-anak yang stunting bisa jadi mengalami gangguan fisik, kekebalan tubuh yang lemah, terhambatnya perkembangan mental, gangguan nutrisi dan kesehatan, hingga memiliki prestasi akademik yang rendah.

Kementrian Kesehatan menegaskan bahwa stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan memengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang juga buruk. Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius. (Bimrew Sendekie Belay, 2022)

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) resmi mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Capaian tahun 2024 memberi angin segar bagi pencapaian target penurunan angka stunting nasional menjadi 14,2% pada tahun 2029, sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dari angka 21,5% di 2023, untuk dapat turun ke angka 14,2% di 2029, ini artinya Indonesia masih harus menurunkan sekitar 7,3% poin dalam lima tahun ke depan. Penurunan angka stunting yang tidak merata perlu adanya evaluasi dan penanganan lebih serius. Capaian prevalensi stunting 19,8% ini juga menjadi tantangan baru, mengingat target penurunan stunting pada 2025 adalah 18,8%, membutuhkan upaya lebih keras dan kolaborasi lebih erat, terutama di enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar, yaitu Jawa Barat (638.000

balita), Jawa Tengah (485.893 balita), Jawa Timur (430.780 balita), Sumatera Utara (316.456 balita), Nusa Tenggara Timur (214.143 balita), dan Banten (209.600 balita) (Kemenkes RI, 28 Mei 2025).

Tabel 1. Klasifikasi Artikel terkait Permasalahan Stunting di Indonesia

Judul Artikel	Isu Pokok/Informasi Penting	Tahun
Stunting Pada Anak: Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia	Faktor risiko terjadinya stunting di Indonesia dapat berasal dari faktor ibu, anak, maupun lingkungan. (Nirmalasari, 2020)	2020
Analisis Multilevel Faktor Resiko Stunting di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur	Dari analisis faktor penyebab terjadinya stunting yaitu pendidikan ibu, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu mengenai gizi, , tingkat kecukupan zing dan zat besi, riwayat penyakit infeksi, dan level komunitas seperti keaktifan posyandu memiliki pengaruh kontekstual (Yuana et al., 2021)	2021
Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia	Kejadian stunting pada balita di Indonesia dengan pemberian ASI eksklusif, berat badan lahir, usia dan panjang badan lahir dengan kejadian stunting pada balita. (Aurima et al., 2021)	2021
Stunting: Penyebab, Gejala, dan Pencegahan	Faktor yang dapat menyebabkan stunting adalah imunisasi, imunisasi berperan dalam terjadinya stunting, karena anak yang tidak mendapat imunisasi lebih rentan terkena penyakit yang erat kaitannya dengan stunting. (Fauziah et al., 2024)	2024
Deteksi Dini Stunting Melalui Risiko Komplikasi Kehamilan	Faktor stunting adalah ibu saat hamil, maka perlu upaya untuk memastikan ibu hamil dalam kondisi sehat dengan cara melakukan pemeriksaan kehamilan. (Bimrew Sendekie Belay, 2022)	2022

Stunting atau anak pendek berdasarkan umur merupakan salah satu indikator kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan asupan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Seperti yang dijelaskan pada artikel diatas salah satu faktor terjadinya stunting yaitu pada awal kehamilan terutama pada kesehatan ibu. Karenanya periode 1.000 HPK ini disebut pula sebagai periode emas untuk melakukan pencegahan atau koreksi masalah stunting dengan berbagai intervensi gizi spesifik dan sensitif. Intervensi gizi spesifik terdiri dari berbagai program yang bertujuan untuk menanggulangi penyebab langsung masalah stunting,

sementara intervensi gizi sensitif merupakan kelompok program yang bertujuan untuk menanggulangi berbagai penyebab tak langsung dari stunting. Dengan kata lain, masalah stunting bersifat multifaktor yang dalam pemantauannya membutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi.

1.2 Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan.(Bimrew Sendekie Belay, 2022)

Stunting merupakan situasi dimana terjadinya kekurangan gizi pada anak, adanya infeksi kronis, dan umumnya dilihat dari tinggi badan anak sesuai umur pada anak balita yang kurang normal. Malnutrisi berpotensi terjadi pada masa prenatal dan hari-hari awal setelah kelahiran, namun dampaknya mungkin baru terlihat hingga anak mencapai usia dua tahun, sebagaimana dikuatkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2018.(Fauziah et al., 2024)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan kondisigagal tumbuh atau suatu kondisi kronis akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup panjang sehingga dapat mengganggu pertumbuhan pada anak.

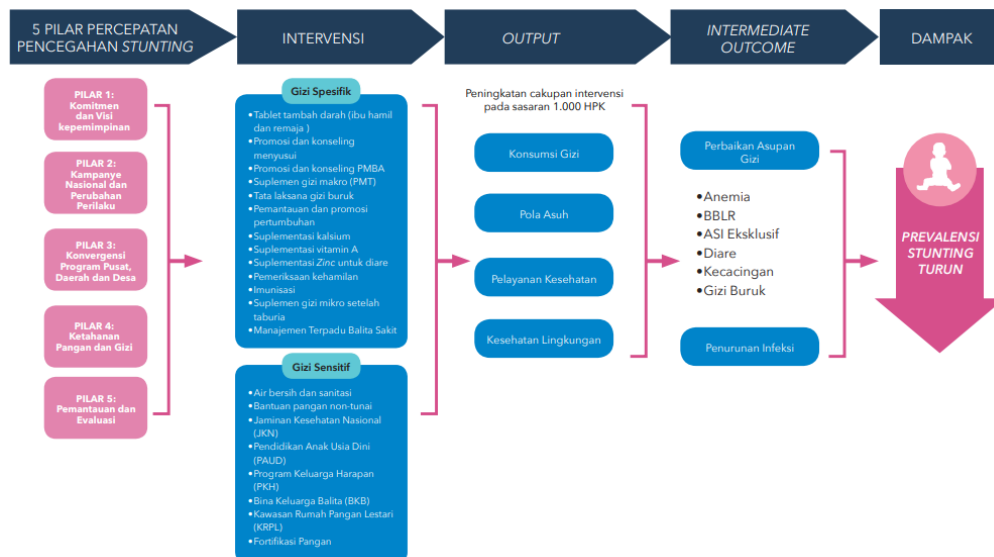
b. Faktor dan Pencegaha Stunting

Faktor-faktor terjadinya stunting yaitu stunting dapat diketahui melalui evaluasi komprehensif terhadap tinggi badan anak, dimana pengukurannya diperiksa secara cermat berdasarkan serangkaian tolok ukur yang diakui secara universal dan telah ditentukan sebelumnya. Diakui secara luas dalam skala global bahwa anak-anak dianggap stunting jika panjang atau tinggi badan mereka berada di bawah -2 standar deviasi dari nilai median yang ditetapkan oleh Standar Pertumbuhan Anak WHO untuk usia dan jenis kelamin mereka (WHO 2008; de Onis et al.2013). Demikian pula, anak-anak diklasifikasikan sebagai stunting berat jika panjang atau tinggi badan mereka berada di bawah -3 standar deviasi dari median Standar Pertumbuhan Anak WHO untuk usia dan jenis kelamin mereka. Kurangnya nutrisi penting, khususnya energi, secara langsung menghambat perkembangan fisik makhluk tak berdosa ini. Hubungan yang rumit ini membentuk siklus berbahaya dimana anak-anak yang kekurangan gizi, yang sudah menderita melemahnya kekebalan tubuh, semakin menurun kesehatannya dan semakin sulit memerangi penyakit. Faktor selanjutnya berperan penting pada salah satu penyebab terjadinya stunting yaitu pemberian ASI eksklusif oleh ibu. Menurut penelitian cermat yang dilaksanakan oleh Purnamasari dan Rahmawati (2021), diketahui bahwa bayi yang hanya menerima ASI secara signifikan lebih rentan mengalami gangguan

pertumbuhan, dengan kemungkinan peningkatan sebesar 3,7 kali lipat. (Fauziah et al., 2024)

Pemerintah telah menetapkan strategi lima pilar penanganan stunting, yaitu: 1) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan, 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, 3) peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif, 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi, dan 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, inovasi, dan evaluasi. Selain itu juga terdapat upaya percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2021). Indikator sasaran percepatan penurunan stunting pada layanan intervensi spesifik adalah: 1) persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi, 2) persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan, 3) persentase remaja putri yang mengonsumsi TTD, 4) persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, 5) persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), 6) persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk, 7) persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, 8) persentase balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi, dan 9) persentase balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap (Peraturan Presiden Republik Indonesia 2021). (Bimrew Sendekie Belay, 2022)

Gambar ke 1. Kerangka Konsep atau *TOC (Theory of Change)*
Percepatan Penurunan *Stunting*



Sumber : dashboard stunting

BAB II

Agenda Setting

a. Pengertian Agenda Setting

Menurut William N Dunn dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” mengemukakan bahwa terdapat beberapa tahap dalam proses terciptanya suatu kebijakan publik, proses tersebut diawali dengan adanya agenda penyusunan kebijakan (agenda-setting policy), lalu dilanjutkan ke tahap formulasi kebijakan, kemudian tahap terakhir yakni adopsi kebijakan. John W. Kingdon berpendapat bahwa agenda-setting merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan kebijakan yang dimana didalamnya terdapat daftar isu-isu atau masalah yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah atau orang-orang yang mempunyai wewenang dalam pembuatan keputusan. (Alfathon et al., 2023)

Pada jurnal agenda setting dalam ilmu komunikasi dapat dikemukakan bahwa agenda setting theory membicarakan tentang peran besar media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Masyarakat menjadi terbiasakan dengan berita-berita yang disampaikan media, sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam pergaulan sehari-hari. Berita atau informasi yang disampaikan media tersebut bukan saja hanya sebagai ilmu atau pengetahuan bagi masyarakat, tetapi bahkan bisa mengubah gaya hidup, perilaku, ataupun sikap masyarakat. (Ritonga, 2018)

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa agenda setting adalah tahapan isu-isu atau berita tentang kebijakan yang perlu dijadikan prioritas tindakan pemerintah melalui pengaruh masyarakat, media, maupun politik.

b. Tahapan Agenda Setting Menurut Para Ahli

Agenda Setting adalah proses dimana media massa menyoroti isu-isu tertentu secara sering dan menonjol, sehingga masyarakat menganggap isu-isu tersebut lebih penting dibandingkan isu-isu lainnya. Yang dimaksud dengan “setting” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tindakan menata atau mengorganisir (seperti menata rambut atau menata huruf-huruf di mesin cetak). Dalam konteks komunikasi, menurut Maxwell E. McCombs dan Donald L. Shaw, agenda setting mengacu pada kemampuan media massa untuk mentransfer aspek berita yang paling menonjol dari agenda beritanya ke agenda publik. Seiring berjalannya waktu, media massa dapat mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat dengan memprioritaskan dan menekankan isu-isu tertentu dalam liputannya. Proses ini membentuk persepsi publik dan menyelaraskannya dengan perspektif media mengenai hal yang paling penting (Nuruddin, 2007). Dalam konteks ini, teori agenda setting menekankan pentingnya peran media massa dalam membentuk agenda publik, yang pada akhirnya mempengaruhi aliran dan dampak informasi. Teori ini bekerja dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memusatkan perhatian pada isu-isu yang dianggap paling penting oleh media, dan memastikan isu-isu tersebut dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya oleh masyarakat. Pengaruh ini terlihat jelas dari cara masyarakat terus berdiskusi dan memberikan umpan

balik terhadap liputan media mengenai topik tertentu, sehingga semakin memperkuat peran media dalam mengarahkan perhatian publik dan membentuk persepsi mengenai hal-hal yang paling penting.

Hubungan antara media dan penetapan agenda merupakan hal yang tidak terpisahkan, karena media menyoroti topik-topik berita tertentu yang mereka anggap penting, yang pada gilirannya mempengaruhi individu untuk lebih fokus pada isu-isu tersebut dibandingkan isu-isu lain. Proses ini tidak hanya membentuk persepsi publik namun juga dapat mempengaruhi agenda yang lebih luas, termasuk kebijakan publik, strategi perusahaan, dan berbagai sektor seperti politik, ekonomi, budaya, dan olahraga. Di era digital, media massa terus berperan penting dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat melalui agenda setting. (Halimatussa'diah et al., 2025)

Robert W Cobb dan Charles D Edler menyatakan bahwa, menurutnya dalam merumuskan kebijakan publik ditahap agenda-setting policy terbagi menjadi 2 diantaranya ialah agenda-setting lembaga ataupun pemerintah dan agenda-setting yang bersifat sistematis. Agenda-setting lembaga atau pemerintah merupakan suatu agenda yang didalamnya berisi terkait isu yang mendapatkan perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Sedangkan agenda-setting sistematis ialah suatu agenda pembahasan yang didalamnya berisi agenda dari seluruh isu yang menuntut perspektif dari para aktor politik yang dapat dianggap layak untuk mendapatkan perhatian secara serius oleh khalayak publik dan kemudian permasalahan atau isu tersebut diarahkan kepada pemerintah selaku badan yang memiliki wewenang yang sah dalam pembuatan kebijakan. (Alfathon et al., 2023)

Teori agenda-setting policy yang dikembangkan oleh John W Kingdon terdapat 3 proses didalamnya, tahapan didalam agenda-setting policy tersebut diantaranya ialah proses identifikasi masalah (problem stream), penentuan kebijakan (policy stream) dan terakhir proses politik (political stream). Melalui ketiga proses ini isu-isu akan menghasilkan adanya kebijakan publik. Alasan menggunakan teori John W Kingdon karena Kingdon menjelaskan proses agenda setting secara dinamis, selain itu karena alasan teoritis yang menjelaskan faktor waktu dan peluang dalam teori tersebut Kingdon menekankan pentingnya momen yang tepat terkadang masalah sudah lama ada akan tetapi baru menjadi prioritas Ketika ada tekanan publik.

Identifikasi Masalah (Problem Stream)

Dalam proses pembentukan kebijakan publik biasanya pembuat kebijakan publik tidaklah berhadapan langsung dengan suatu permasalahan yang diberikan, namun para aktor pembuat kebijakan inilah yang harus menemukan dan mencari masalah yang terdapat di tatanan masyarakat agar dibuatkan solusinya. Pembuat kebijakan harus mampu menemukan, mencari dan mengidentifikasi masalah yang terjadi dengan benar dan tepat. John W Kingdon mengemukakan bahwa isu ataupun permasalahan diperhatikan oleh pemerintah, hal tersebut dapat dijadikan alat oleh pemerintah untuk mengkaji serta memahami suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu masalah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh John W Kingdon

terkait alat yang digunakan untuk mempelajari suatu masalah ialah, yang pertama yakni indikator yang digunakan untuk mengukur sebuah masalah dapat dinilai penting atau tidak. Kedua yakni peristiwa, peristiwa yang dimaksud ialah kondisi yang terjadi agar pembuat kebijakan memberikan fokus dan perhatian akan peristiwa tersebut. Ketiga ialah reaksi dalam bentuk informasi kinerja. Lalu yang terakhir ialah cara pembuat kebijakan menilai suatu peristiwa menjadi suatu masalah. (Alfathon et al., 2023)

Pada identifikasi masalah kasus stunting di Indonesia ketidakmerataan penurunan angka stunting. Meskipun ada penurunan angka *stunting* secara nasional, data menunjukkan bahwa 11 provinsi justru mengalami peningkatan angka *stunting*, dan tiga di antaranya mengalami kenaikan signifikan (Riau naik 6,5 persen, Nusa Tenggara Barat naik 5,2 persen, dan Sulawesi Barat naik 5,1 persen). Selain itu, terdapat disparitas prevalensi yang besar, dengan Bali memiliki angka terendah (8,7 persen), sedangkan Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah memiliki angka di atas 30 persen. (Kompas, 09 Juni 2025)

Pada kasus di Samarinda, Kalimantan Timur terdapat 4.177 anak tercatat stunting. Hal tersebut menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk bisa menggenjot penurunan angka stunting. Wakil Wali Kota Samarinda, Syaifuddin Zuhri mengatakan program itu kini melibatkan PLN Kota Samarinda dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Perwakilan Kalimantan Timur sebagai mitra kerja. Kolaborasi ini menjadi kerja sama pertama antara pemerintah dan sektor nonpemerintah dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (genting).

Selanjutnya pada berita di Kabupaten Magelang tanggal 14 Oktober 2025. Melalui data elektronik pencatatan gizi berbasis masyarakat, angka tersebut bahkan tercatat 14,58 persen pada 2024. Meski demikian, tantangan masih tinggi. Dari total 72.603 balita, tercatat 52.460 anak mengalami masalah gizi, di antaranya 10.816 balita stunting, 33.402 berat badan rendah, 5.850 *underweight*, dan 77 balita gizi buruk. Ini menunjukkan intervensi harus lebih terarah dan menyentuh akar masalah, bukan hanya gejala. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Magelang Nanda Cahyadi Pribadi menegaskan, komitmen dari Pemkab Magelang untuk menekan angka stunting di wilayah Kabupaten Magelang. Menurutnya, stunting masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pendidikan, sosial, pertanian, hingga lembaga keagamaan agar penanganannya bisa menyentuh akar permasalahan.

Penentuan Alternatif Kebijakan (Policy stream)

Ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah stunting di Indonesia yaitu yang pertama, penguatan intervensi gizi spesifik yang berfokus pada penanganan langsung penyebab stunting. Dapat diuayakan seperti kegiatan pemberian makanan tambahan bergizi untuk ibu hamil dan balita, suplemen zat besi dan vitamin, dalam hal ini aktor utama yang bekerja yaitu kementerian Kesehatan, posyandu dan puskesmas.

Selanjutnya alternatif kebijakan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah stunting di Indonesia adalah integrasi program lintas sektor (pendekatan holistik) pendekatan konvergensi yang menggabungkan intervensi spesifik dan sensitive. Dapat diambil contoh kegiatan sinkronisasi program antar instansi, satu data stunting , pendampingan keluarga atau fokus pada ibu dan anak berisiko stunting. Dalam hal ini aktor utama yang bekerja yaitu Bappenas, pemerintah daerah, serta kementerian terkait. Pada tahap ini media dan Masyarakat mulai ramai membahas isu karena dampaknya terhadap masa depan generasi muda.

Proses Politik (Political Stream)

Aktor politik dalam aliran ini merupakan faktor penting didalam proses agenda setting policy yang mempunyai peran utama dalam aspek politis di tatanan pemerintahan. John W Kingdon mengklasifikasikan aktor yang terlibat dalam proses agenda-setting policy ke dalam 2 kategori yakni aktor yang terlihat dan aktor yang tidak terlihat. Aktor yang terlihat ialah aktor yang mendapatkan perhatian dari setiap elemen masyarakat, aktor tersebut diantaranya seperti presiden, partai politik dan anggota kongres yang menonjol. Sedangkan aktor yang tidak terlihat ialah aktor yang tidak mendapatkan perhatian dari publik, biasanya aktor tersebut terdiri dari staff kongres, akademisi, birokrat karir dan kelompok analisis kepentingan. Masing-masing dari kategori diatas mempunyai peranannya sendiri, aktor yang terlihat berperan dalam mempengaruhi agenda kebijakan sedangkan aktor yang tidak terlihat berperan dalam mempengaruhi solusi alternatif kebijakan.(Alfathon et al., 2023)

Pada kesimpulannya, kasus stunting dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah perlu adanya langkah-langkah strategis pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan perlunya analisis pemerintah tentang efektivitas, efisiensi, dan dampak sosial dari setiap alternatif. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi formulasi kebijakan stunting di Indonesia adalah proses strategis dan kolaboratif yang bertujuan menurunkan angka stunting melalui identifikasi masalah gizi kronis, penyusunan alternatif solusi berbasis data, serta pengambilan keputusan lintas sektor yang diatur melalui regulasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathon, R. P., Fauzi Said, M., & Ilman Hakim, A. (2023). Analisis Agenda-setting Policy dalam Proses Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. *Journal of Politics and Policy*, 5(1), 40–57. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.01.04>
- Aurima, J., Susaldi, S., Agustina, N., Masturoh, A., Rahmawati, R., & Tresiana Monika Madhe, M. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia. *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences*, 1(2), 43–48. <https://doi.org/10.53801/oajjhs.v1i3.23>
- Bimrew Sendekie Belay. (2022). Deteksi Dini Stunting. *Deteksi Dini Tentang Ciri-Ciri Stunting Pada Baita Di Huta Holbung Kec.Angkola Muaratais Kab.Tapanuli Selatan*, 4(8.5.2017), 2003–2005.
- Erwan Efendi, Abdilah Taufiqurrohman, Tris Supriadi, E. K. (2023). Teori Agenda Setting Komunikasi. *Junral Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1715–1718.
- Fauziah, J., Trisnawati, K. D., Rini, K. P. S., & Putri, S. U. (2024). *Stunting : Penyebab , Gejala , dan Pencegahan*. 2, 1–11.
- Halimatussa'diah, Hasmawati, F., & Manalullaili. (2025). Analisis Agenda Setting di Harian Umum Palembang Pos Dalam Menarik Minat Pembaca Berita. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.47134/jpbsi.v1i2.1476>
- Juditha, C. (2019). Agenda Setting Penyebaran Hoaks di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 22(2), 155–168. <https://doi.org/10.20422/jpk.v22i2.669>
- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting Pada Anak : Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia. *Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting Pada Anak : Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia. Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 14(1), 19–28. <https://doi.org/10.20414/Qawwam.v.14i1.2372>
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1460>
- SATISPI, E., GANDINI, D., & RAHMAN, A. (2020). Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Praktek Kebijakan. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Yuana, N., Larasati, T., & Berawi, K. N. (2021). Analisis Multilevel Faktor Resiko Stunting di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(2), 213–217. <https://doi.org/10.30604/jika.v6i2.510>

4.177 Anak Samarinda Tergolong Stunting, Wakil Wali Kota Samarinda Targetkan Penurunan Hingga 18 Persen (Rahayu, Selasa, 14 Oktober 2025)

<https://share.google/Ep1ZZLiqwh15CoxBo>

77 Balita di Kabupaten Magelang Alami Gizi Buruk, Sebanyak 10.816 Balita Stunting (Rofik Syarif Ghirinda Putra, Selasa, 14 Oktober 2025)

<https://share.google/aNSUwLy7fcnEzYG3O>